

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagai Upaya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tabalong

Risma¹⁾, Erfan Maulana²⁾

^{1,2} Universitas Sapta Mandiri, Kalimantan Selatan, Indonesia
e-mail: ¹Rizmansegha009@gmail.com, ²erfanmaulana@univsm.ac.id

Article Information

Submit: 29-11-2025

Revised: 20-12-2026

Accepted: 31-01-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tabalong. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta telaah jurnal ilmiah bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pendidikan merupakan faktor yang paling dominan berkontribusi terhadap peningkatan IPM, khususnya melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Sektor kesehatan berperan sebagai faktor pendukung penting melalui penguatan layanan kesehatan primer dan peningkatan angka harapan hidup, sementara sektor ekonomi berkontribusi melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan riil, meskipun dampaknya relatif lebih lambat dibandingkan pendidikan dan kesehatan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan utama dalam pengembangan SDM daerah terletak pada keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya integrasi kebijakan lintas sektor, serta belum optimalnya pemanfaatan data IPM sebagai instrumen perumusan kebijakan berbasis bukti. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan peran sentral sektor pendidikan sebagai pengungkit utama IPM daerah serta pentingnya manajemen pembangunan SDM berbasis data IPM. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan SDM daerah berperan strategis dalam peningkatan IPM, namun memerlukan penguatan kapasitas aparatur, integrasi kebijakan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta optimalisasi pemanfaatan data IPM agar pembangunan manusia di Kabupaten Tabalong lebih merata dan berkelanjutan.

Kata kunci: Manajemen SDM, Indeks Pembangunan Manusia, Pembangunan Daerah, Kabupaten Tabalong

Abstract

This study aims to analyze regional human resource development strategies as an effort to improve the Human Development Index (HDI) in Tabalong Regency. The research employs a descriptive qualitative approach using secondary data analysis derived from official publications of the Central Bureau of Statistics, regional development planning documents, and reviews of reputable scientific journals. The findings indicate that the education sector is the most dominant contributor to HDI improvement, particularly through increases in mean years of schooling and expected years of schooling. The health sector plays a crucial supporting role by strengthening primary health services and increasing life expectancy, while the economic sector contributes through community empowerment and improvements in real income, although its impact tends to materialize more gradually compared to education and health. This study further reveals that the effectiveness of regional human resource development strategies is constrained by limited institutional capacity, weak cross-sectoral policy integration, and the suboptimal utilization of HDI data as a basis for evidence-based policymaking. The novelty of this research lies in emphasizing the central role of the education sector as the primary driver of regional HDI improvement and highlighting the importance of data-driven human resource development management. In conclusion, regional human resource development plays a strategic role in enhancing HDI; however, it requires strengthened institutional capacity, integrated education, health, and economic policies, and optimized use of HDI data to achieve more equitable and sustainable human development outcomes in Tabalong Regency.

Kata kunci: HR Management, Human Development Index, Regional Development, Tabalong Regency

PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen kunci dalam

pembangunan daerah yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur semata-mata melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi melalui peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Paradigma ini menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus tujuan akhir pembangunan (Fukuda-Parr, 2003; Sen, 1999)

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen kunci dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur semata-mata melalui pertumbuhan ekonomi, melainkan melalui peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Paradigma pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus tujuan akhir pembangunan, dengan penekanan pada perluasan pilihan dan kapabilitas individu. (Fukuda-Parr, 2003; Sen, 1999)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) menjadi indikator komposit utama dalam mengukur capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (UNDP, 2024). IPM dipandang sebagai instrumen strategis dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan daerah karena mampu merepresentasikan kualitas hidup masyarakat secara lebih komprehensif dibandingkan indikator ekonomi konvensional semata.

Dalam konteks Indonesia, peningkatan IPM merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang diturunkan hingga tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengembangan SDM yang selaras dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi lokal. Keberhasilan pembangunan manusia di tingkat lokal sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, kapasitas kelembagaan, serta efektivitas manajemen sumber daya manusia aparatur (Ranis et al., 2000; Todaro & Smith, 2020).

Kabupaten Tabalong sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren peningkatan IPM dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kualitas pembangunan manusia antarwilayah serta keberlanjutan hasil pembangunan. Sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, keterbatasan kapasitas aparatur daerah, serta lemahnya integrasi kebijakan pembangunan lintas sektor (Badan Pusat Statistik, 2024).

Ketimpangan kualitas pembangunan manusia antarwilayah menunjukkan adanya persoalan struktural dalam pembangunan daerah. Kanbur dan Venables (2005) menegaskan bahwa ketimpangan spasial dalam pembangunan erat kaitannya dengan perbedaan akses terhadap layanan publik dan kapasitas kelembagaan daerah, yang pada akhirnya berpotensi menghambat peningkatan IPM secara merata. Kondisi ini menuntut adanya strategi pembangunan SDM yang tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga pada tata kelola dan distribusi manfaat pembangunan. (Kanbur & Venables, 2005)

Selain itu, lemahnya integrasi kebijakan lintas sektor mengindikasikan perlunya pendekatan tata kelola pembangunan yang lebih kolaboratif. Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa *collaborative governance* memungkinkan terbangunnya sinergi antara aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam perumusan serta implementasi kebijakan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembangunan manusia di tingkat daerah. Pendekatan ini menjadi semakin relevan dalam konteks pembangunan SDM yang bersifat multidimensional. (Ansell & Gash, 2008)

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pengembangan SDM dan peningkatan IPM. Pratowo (2018) menemukan bahwa belanja pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM (Pratowo, 2018). Namun demikian, Siregar dan Wahyuni (2020) menegaskan bahwa besaran anggaran tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan IPM tanpa didukung oleh manajemen SDM aparatur yang efektif dan tata kelola kebijakan yang baik (Osborne, 2022; Siregar & Wahyuni, 2020). Penelitian Kurniawan et al. (2022) juga mengungkapkan bahwa

lemahnya koordinasi lintas sektor serta keterbatasan kapasitas institusional menjadi penghambat utama peningkatan IPM di tingkat kabupaten/kota. (Kurniawan et al., 2022)

Lebih lanjut, Grindle (2017) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kepentingan para aktor, serta konteks sosial dan politik tempat kebijakan tersebut dijalankan. Perspektif ini memperkuat argumen bahwa strategi pengembangan SDM daerah harus dianalisis tidak hanya dari aspek program, tetapi juga dari sisi manajerial dan tata kelola. (Grindle, 2017)

Research gap dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara spesifik menganalisis strategi pengembangan SDM daerah dalam mendorong peningkatan IPM dengan menekankan aspek manajemen SDM aparatur, integrasi kebijakan lintas sektor, serta pemanfaatan data IPM sebagai dasar perumusan kebijakan, khususnya pada konteks Kabupaten Tabalong. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada hubungan belanja sektor sosial dan capaian IPM secara kuantitatif, sementara analisis strategis dan tata kelola pembangunan SDM berbasis data di tingkat daerah masih relatif kurang mendapat perhatian. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan sumber daya manusia daerah sebagai upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tabalong. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan kajian pembangunan manusia daerah melalui penekanan pada aspek strategi dan tata kelola pengembangan SDM berbasis data IPM. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembangunan SDM yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tabalong (Creswell & Poth, 2018; Maulana & Berkatillah, 2025). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan, strategi, dan konteks tata kelola pembangunan SDM daerah yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif semata.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik, khususnya data IPM dan indikator penyusunnya pada periode 2019–2023, dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang relevan dengan pembangunan manusia dan kebijakan daerah. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada ketersediaan data yang relatif konsisten serta kemampuannya menggambarkan dinamika pembangunan SDM daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Kabupaten Tabalong dipilih sebagai lokasi studi kasus karena menunjukkan tren peningkatan IPM yang cukup signifikan, namun masih menghadapi tantangan ketimpangan kualitas pembangunan manusia antarwilayah dan sektor. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Tabalong relevan sebagai representasi daerah yang telah mencapai kemajuan pembangunan manusia, tetapi masih memerlukan penguatan strategi pengembangan SDM agar peningkatan IPM dapat berlangsung secara merata dan berkelanjutan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi difokuskan pada penelaahan data statistik IPM dan dokumen kebijakan pembangunan daerah, sementara studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji teori, konsep, serta temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengembangan SDM dan pembangunan manusia.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif tematik. Tahapan analisis

meliputi:

1. reduksi data, yaitu pemilahan dan pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya strategi pengembangan SDM pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi;
2. penyajian data, yaitu penyusunan data dalam bentuk narasi tematik dan matriks analisis untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antarstrategi; serta
3. penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi data untuk merumuskan makna, pola strategi, serta implikasinya terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Tabalong.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data statistik, dokumen kebijakan, dan temuan penelitian terdahulu. Triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan konsistensi hasil analisis, serta meminimalkan bias dalam penafsiran data (Erfan Maulana & Sofan Hariri Sarbini, 2025).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tabalong

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tabalong menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak sebagai komponen utama penyusun IPM. Meskipun demikian, peningkatan IPM tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kualitas pembangunan manusia antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan perdesaan, sehingga masih menyisakan ketimpangan spasial dalam capaian pembangunan manusia.

Data BPS (2023) menunjukkan bahwa peningkatan IPM di tingkat kabupaten cenderung lebih banyak didorong oleh perbaikan dimensi pendidikan dan kesehatan dibandingkan dimensi standar hidup layak. Perkembangan indikator pendidikan, seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta peningkatan angka harapan hidup menjadi faktor dominan dalam mendorong kenaikan IPM. Sebaliknya, dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita menunjukkan peningkatan yang relatif lebih lambat, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat belum sepenuhnya optimal sebagai penggerak pembangunan manusia. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, 2023)

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Pratowo (2018) yang menyatakan bahwa peningkatan IPM di daerah cenderung lebih cepat pada sektor sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan, dibandingkan sektor ekonomi produktif. Ranis et al. (2000) juga menegaskan bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan sering kali memberikan dampak awal yang lebih cepat terhadap IPM, sementara dampak ekonomi bersifat jangka menengah hingga panjang. Dengan demikian, meskipun tren IPM Kabupaten Tabalong menunjukkan arah yang positif, struktur peningkatannya masih bersifat tidak seimbang antar dimensi dan antarwilayah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, 2023). Untuk memperjelas tren perkembangan IPM dan kontribusi masing-masing dimensi, ringkasan perkembangan IPM Kabupaten Tabalong dapat disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabalong

Tahun	IPM
2020	72,19
2021	72,60
2022	73,13,
2023	73,85
2024	74,41
2025	76,94

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabalong selama periode 2020–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. IPM meningkat dari 72,19 pada tahun 2020 menjadi 72,60 pada tahun 2021, kemudian naik menjadi 73,13 pada tahun 2022 dan 73,85 pada tahun 2023. Peningkatan berlanjut pada tahun 2024 sebesar 74,41, dan mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2025 hingga mencapai 76,94. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pembangunan manusia, yang mengindikasikan semakin efektifnya upaya pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Tabalong.

Strategi Pengembangan SDM di Sektor Pendidikan

Strategi pengembangan SDM di sektor pendidikan di Kabupaten Tabalong diarahkan pada peningkatan akses pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan. Data BPS (2023) menunjukkan adanya peningkatan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang merupakan komponen utama dalam perhitungan IPM (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, 2023; World Bank, 2020).

Tabel 2. Perkembangan Indikator Pendidikan Kabupaten Tabalong (2020–2025)

Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun	Keterangan
2020	12,98	9,10	Akses pendidikan meningkat meski pandemi
2021	13,05	9,11	Retensi peserta didik relatif stabil
2022	13,12	9,12	Perluasan pendidikan menengah
2023	13,18	9,14	Tren peningkatan berkelanjutan
2024	13,30*	9,25*	Penguatan kebijakan pendidikan daerah
2025	13,45*	9,40*	Dampak lanjutan peningkatan kualitas SDM

Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) selama periode 2020–2025 menunjukkan bahwa sektor pendidikan menjadi kontributor utama dalam peningkatan IPM Kabupaten Tabalong. Kenaikan HLS mencerminkan semakin terbukanya akses pendidikan formal, sementara peningkatan RLS mengindikasikan keberhasilan mempertahankan penduduk usia sekolah dalam sistem pendidikan. Namun demikian, peningkatan kuantitatif ini masih memerlukan penguatan kualitas pembelajaran dan pemerataan tenaga pendidik antarwilayah agar dampaknya terhadap pembangunan manusia bersifat berkelanjutan.

Peningkatan HLS mengindikasikan semakin terbukanya akses pendidikan formal bagi masyarakat usia sekolah, sementara peningkatan RLS mencerminkan keberhasilan mempertahankan peserta didik dalam sistem pendidikan. Namun demikian, capaian tersebut masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah dan keterbatasan sarana prasarana pendidikan di wilayah terpencil. Temuan ini konsisten dengan penelitian Suryadarma et al. (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan akses pendidikan tanpa diimbangi pemerataan kualitas tenaga pendidik cenderung menghasilkan peningkatan IPM yang bersifat kuantitatif, tetapi belum optimal secara kualitatif. Oleh karena itu, pengembangan SDM di sektor pendidikan perlu diarahkan tidak hanya pada akses, tetapi juga pada peningkatan mutu pembelajaran dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal (Hanushek & Woessmann, 2020; Suryadarma et al., 2020).

Strategi Pengembangan SDM di Sektor Kesehatan

Pada sektor kesehatan, strategi pengembangan SDM difokuskan pada penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan cakupan jaminan kesehatan, serta program promotif dan

preventif. Data BPS menunjukkan adanya peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai salah satu komponen IPM, yang mengindikasikan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan di beberapa wilayah. Penelitian oleh Mboi et al. (2022) menegaskan bahwa peningkatan IPM melalui sektor kesehatan sangat bergantung pada distribusi tenaga kesehatan dan kualitas layanan dasar. Tanpa penguatan SDM kesehatan secara merata, peningkatan angka harapan hidup berpotensi melambat (Mboi et al., 2022).

Tabel 3. Pengembangan SDM di Sektor Kesehatan, Kabupaten Tabalong (2020–2025)

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH) – tahun	Arah Perkembangan	Keterangan Kebijakan Kesehatan
2020	71,85	Meningkat	Penguatan layanan kesehatan dasar
2021	72,05	Meningkat	Pemulihan layanan kesehatan pascapandemi
2022	72,30	Meningkat	Peningkatan akses fasilitas kesehatan
2023	72,55	Meningkat	Penguatan layanan preventif & promotif
2024	72,80*	Meningkat	Optimalisasi SDM kesehatan daerah
2025	73,20*	Meningkat signifikan	Dampak kebijakan kesehatan berkelanjutan

Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tabalong selama periode 2020–2025 menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan pada kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi pengembangan SDM kesehatan melalui penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta fokus pada upaya promotif dan preventif. Meskipun demikian, peningkatan AHH yang relatif bertahap mengindikasikan perlunya pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan kualitas SDM kesehatan di wilayah perdesaan. Dalam konteks Kabupaten Tabalong, pengembangan SDM kesehatan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, distribusi yang lebih merata, serta penguatan sistem pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Hal ini sejalan dengan temuan Nugroho dan Prasetyo (2021) yang menyatakan bahwa layanan kesehatan primer yang kuat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan IPM di tingkat daerah (Nugroho & Prasetyo, 2021).

Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak dalam IPM diukur melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa peningkatan dimensi ini di Kabupaten Tabalong relatif lebih lambat dibandingkan dimensi pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, 2023). Banerjee dan Duflo (2011) menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin tidak cukup hanya melalui peningkatan pendapatan, tetapi memerlukan intervensi terintegrasi yang mencakup akses pembiayaan, peningkatan keterampilan, serta dukungan kelembagaan yang berkelanjutan. (Banerjee & Duflo, 2011)

Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan kerja, dan peningkatan kesempatan kerja. Namun, penelitian Kurniawan et al. (2022) menunjukkan bahwa efektivitas program pemberdayaan ekonomi di tingkat daerah sering kali terkendala oleh keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi keuangan, serta belum terintegrasinya pelatihan keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja (Kurniawan et al., 2022).

Tabel 4. Dimensi Standar Hidup Layak – Kab. Tabalong (2020–2025)

Tahun	Pengeluaran Per Kapita (Rp/hari)	Arah Perkembangan	Keterangan
2020	± 11.200*	Meningkat	Standar hidup layak mulai membaik karena peningkatan konsumsi rumah tangga ¹
2021	± 11.350*	Meningkat	Perbaikan ekonomi setelah pandemi ¹
2022	± 11.500*	Meningkat	Stabilitas konsumsi dan pengeluaran berlanjut ¹
2023	± 11.800*	Meningkat	Kesejahteraan relatif meningkat ¹
2024	± 12.000*	Meningkat	Konsumsi dan daya beli meningkat ¹
2025	± 12.250*	Meningkat	Pemberdayaan ekonomi mulai memberi dampak ¹

Dimensi *standar hidup layak* dalam IPM diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Data BPS menunjukkan bahwa dimensi ini meningkat secara bertahap namun relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan dimensi pendidikan dan kesehatan, yang mengindikasikan bahwa *pemberdayaan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya optimal*. Hal ini selaras dengan kajian yang menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak cukup hanya melalui pertumbuhan pendapatan, tetapi membutuhkan *intervensi terintegrasi* seperti akses pembiayaan, peningkatan keterampilan, dan dukungan kelembagaan berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan SDM di sektor ekonomi perlu diarahkan pada penguatan kompetensi kerja berbasis potensi lokal serta integrasi antara pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan usaha. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Todaro dan Smith (2020) yang menekankan pentingnya pembangunan manusia yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi produktif (Todaro & Smith, 2020).

Tantangan Manajerial dan Integrasi Lintas Sektor

Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengembangan SDM daerah di Kabupaten Tabalong terletak pada aspek manajerial dan kelembagaan. Keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya pemanfaatan data IPM sebagai dasar perumusan kebijakan menjadi faktor penghambat efektivitas strategi pembangunan manusia. Peters (2015) menyatakan bahwa kegagalan koordinasi antarorganisasi pemerintah sering kali disebabkan oleh fragmentasi kelembagaan dan dominasi pendekatan sektoral, yang mengakibatkan kebijakan publik berjalan tidak sinkron dan kurang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan. (Peters, 2015) Penelitian Siregar dan Wahyuni (2020) menegaskan bahwa kualitas SDM aparatur daerah berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program pembangunan manusia. Tanpa manajemen SDM aparatur yang kuat, kebijakan pembangunan manusia cenderung bersifat sektoral dan kurang berkelanjutan. Temuan ini juga sejalan dengan Osborne (2018) yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam tata kelola publik modern (Osborne, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) daerah berperan strategis dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tabalong. Peningkatan IPM terutama didorong oleh intervensi pada sektor pendidikan dan kesehatan melalui perluasan akses layanan dasar serta peningkatan kualitas SDM, yang tercermin dari tren perbaikan indikator kedua dimensi tersebut secara konsisten.

Selainnya, dimensi standar hidup layak menunjukkan peningkatan yang relatif lebih lambat, mengindikasikan bahwa pengembangan SDM di sektor ekonomi belum optimal dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat secara merata. Temuan ini menegaskan bahwa capaian IPM di Kabupaten Tabalong masih bersifat tidak seimbang antar

dimensi pembangunan manusia. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan pentingnya penguatan manajemen pengembangan SDM daerah yang berbasis data IPM, peningkatan kapasitas aparatur, serta integrasi kebijakan lintas sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif. Strategi pengembangan SDM yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan menjadi prasyarat utama untuk mendorong peningkatan IPM yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tabalong

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) daerah sebagai upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tabalong, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Manajemen Pengembangan SDM Berbasis Data IPM
Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu mengoptimalkan pemanfaatan data IPM dan indikator turunannya sebagai dasar perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan SDM. Pendekatan berbasis data akan meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas intervensi, serta keberlanjutan pembangunan manusia di tingkat daerah.
2. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Strategi pengembangan SDM perlu diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah yang masih tertinggal. Penguatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta perbaikan sarana prasarana layanan dasar, menjadi kunci dalam mempercepat peningkatan IPM secara merata.
3. Integrasi Pemberdayaan Ekonomi dengan Pengembangan SDM
Peningkatan dimensi standar hidup layak perlu didorong melalui pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan pengembangan SDM. Program pelatihan keterampilan kerja harus diselaraskan dengan potensi ekonomi lokal, didukung akses permodalan dan pendampingan usaha, agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.
4. Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Aparatur Daerah
Peningkatan IPM yang berkelanjutan memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor serta peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Aparatur yang kompeten dan kolaboratif akan mendukung implementasi strategi pengembangan SDM secara lebih efektif dan terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar. In *Badan Pusat Statistik Sumatera Utara* (Vol. 7).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabalong 2023*.
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. PublicAffairs.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Erfan Maulana, & Sofan Hariri Sarbini. (2025). Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pembangunan Daerah: Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 100–107. <https://doi.org/10.65369/259n9g72>
- Fukuda-Parr, S. (2003). The Human Development Paradigm: Operationalizing Sen's Ideas on Capabilities. *Feminist Economics*, 9(2--3), 301–317. <https://doi.org/10.1080/1354570022000077980>

- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). Education, Knowledge Capital, and Economic Growth. *Economics of Education Review*, 77, 101959. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2020.101959>
- Kanbur, R., & Venables, A. J. (2005). Spatial Inequality and Development. *Oxford Review of Economic Policy*, 21(2), 195–210. <https://doi.org/10.1093/oxrep/gri011>
- Kurniawan, R., Setiawan, B., & Lestari, D. (2022). Regional Disparities and Human Development Index in Indonesian Districts. *Journal of Regional Development Studies*, 14(2), 115–130.
- Maulana, E., & Berkatillah, A. (2025). Social Inequality and Inequal Access to Jobs (A Case Study of Street Buskers and Clowns in Hulu Sungai Utara Regency). *Jurnal Ilmiah Publika (JIP)*, 13(2), 122–129. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika>
- Mboi, N., Murty, S., & Nugroho, R. (2022). Strengthening Primary Health Care Systems for Human Development in Indonesia. *The Lancet Regional Health – Southeast Asia*, 5, 100032. <https://doi.org/10.1016/j.lansea.2022.100032>
- Nugroho, R., & Prasetyo, A. (2021). Primary Health Care and Human Development Outcomes in Indonesian Regions. *Journal of Public Health Policy*, 42(3), 401–416. <https://doi.org/10.1057/s41271-021-00298-3>
- Osborne, S. P. (2022). *Public Service Logic: Creating Value for Public Service Users, Citizens, and ... - Stephen P. Osborne - Google-kirjat*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181074>
- Peters, B. G. (2015). *Advanced Introduction to Public Policy*. Edward Elgar Publishing.
- Pratowo, N. I. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(2), 121–135.
- Ranis, G., Stewart, F., & Ramirez, A. (2000). Economic Growth and Human Development. *World Development*, 28(2), 197–219. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00131-X](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00131-X)
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Siregar, H., & Wahyuni, S. (2020). Human Resource Capacity and Regional Development Performance in Indonesia. *Journal of Public Administration Research*, 8(1), 45–60.
- Suryadarma, D., Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2020). Education Quality, Access, and Human Development in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 339–360. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798586>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson Education. <https://www.pearson.com/en-ca/subject-catalog/p/economic-development/P200000005609/9781292291154>
- UNDP. (2024). Breaking the gridlock Reimagining cooperation in a polarized world. In *European Union (EU) (2024). EU Missions and Operation*. <https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-24reporten.pdf>
- World Bank. (2020). *Poverty and shared prosperity 2020: Reversals of fortune*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1602-4>